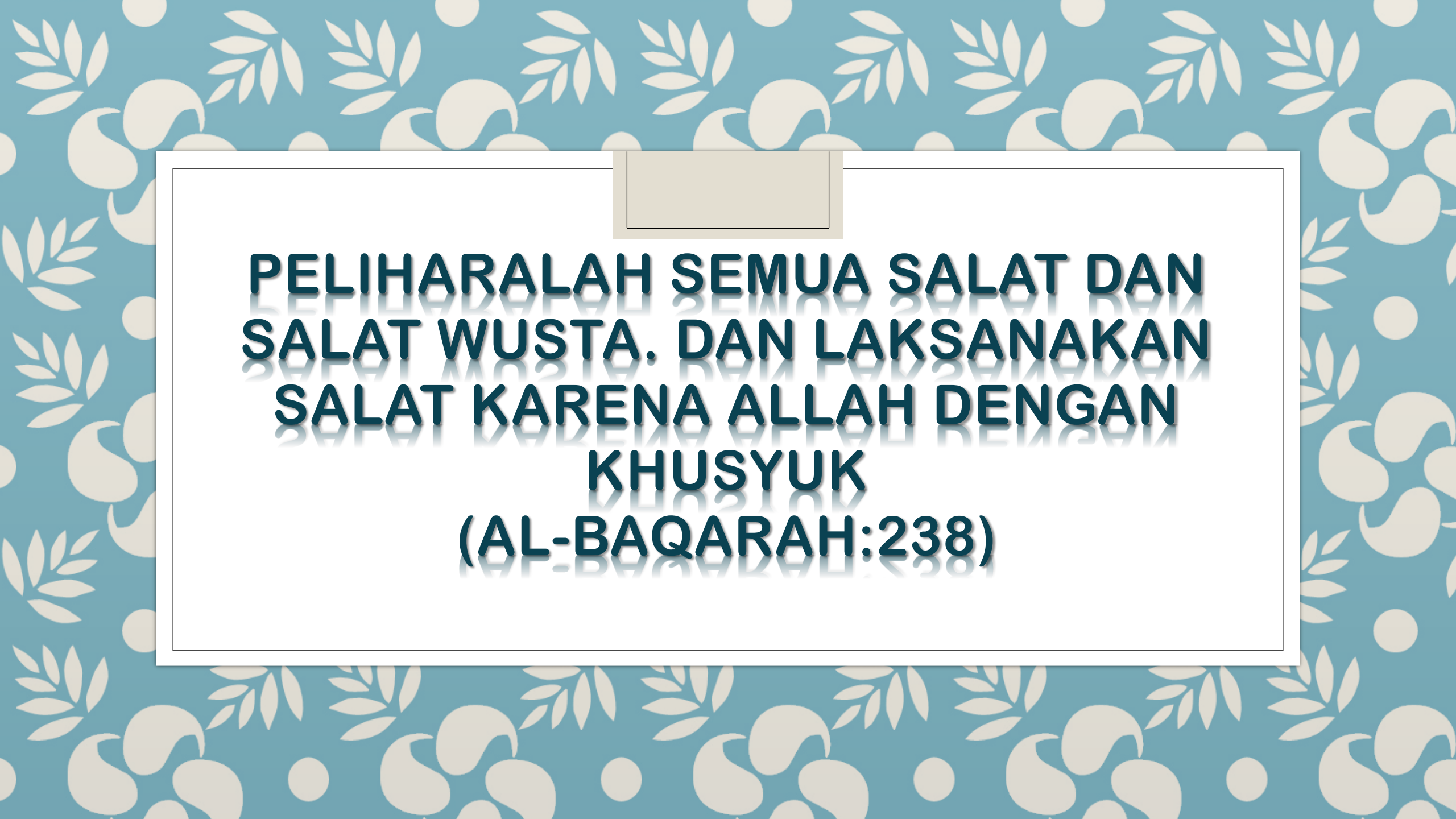




PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh ANGGUN PANE



**PELIHARALAH SEMUA SALAT DAN
SALAT WUSTA. DAN LAKSANAKAN
SALAT KARENA ALLAH DENGAN
KHUSYUK
(AL-BAQARAH:238)**

PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN (POLICY MAKING PROCESS): Proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik yang saling bergantung: penyusunan agenda kebj., formulasi kebj., adopsi kebj., implementasi kebj., dan penilaian kebj. Proses pembuatan kebijakan dapat diartikan sebagai siklus aktivitas yang berurutan menurut waktu dan bersifat tidak linear.

FASE DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN:

- 1. Penyusunan agenda** (Perumusan Masalah)
- 2. Formulasi kebijakan** (Peramalan)
- 3. Adopsi Kebijakan** (Rekomendasi)
- 4. Implementasi Kebijakan** (Pemantauan)
- 5. Penilaian Kebijakan** (Evaluasi)

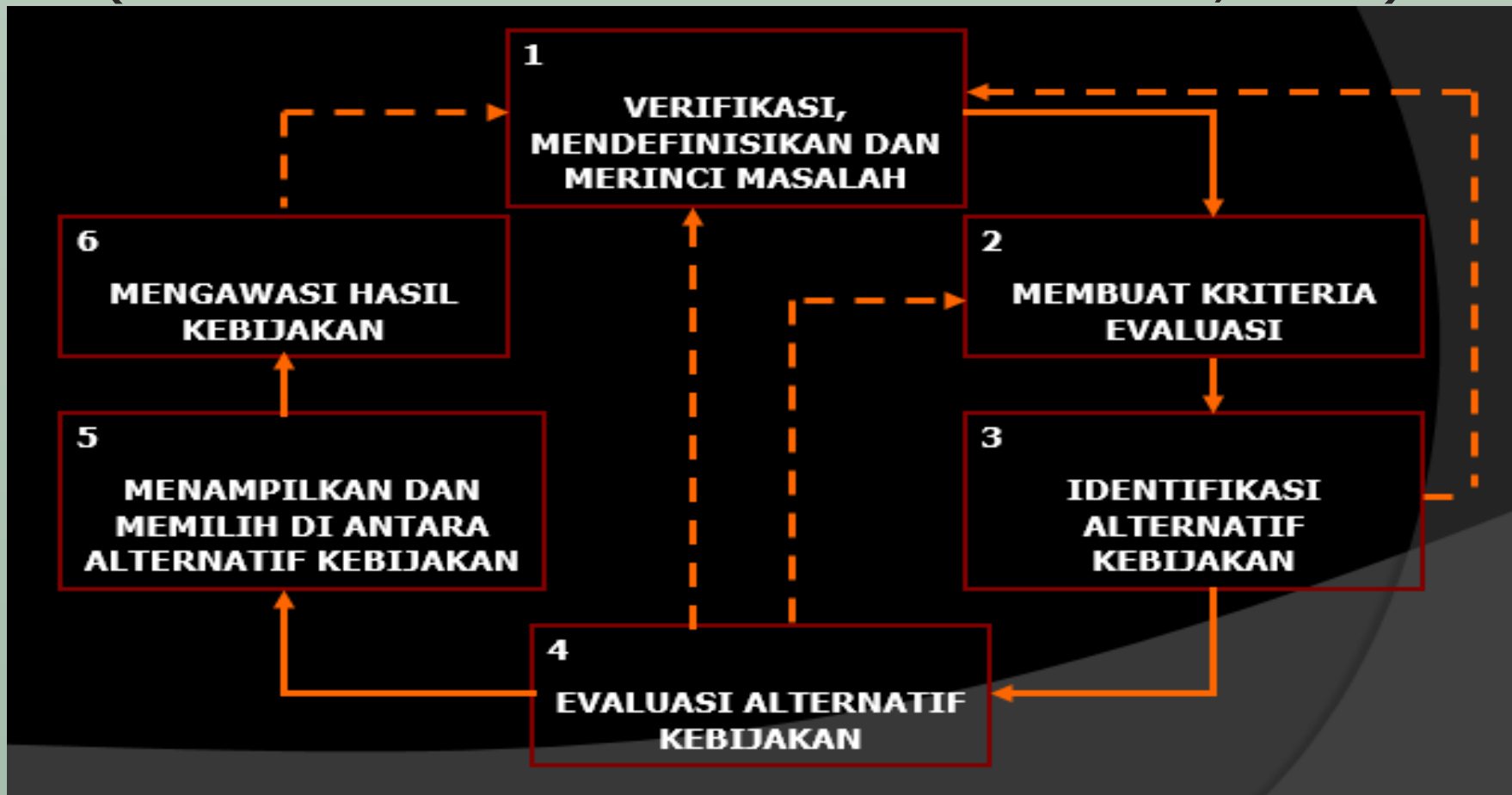
KEBERHASILAN DALAM MEMECAHKAN SUATU MASALAH MEMERLUKAN PENEMUAN SOLUSI YANG TEPAT TERHADAP MASALAH YANG JUGA TEPAT. KITA LEBIH SERING GAGAL KARENA KITA MEMECAHKAN SUATU MASALAH YANG SALAH DARIPADA MENEMUKAN SOLUSI YANG SALAH TERHADAP MASALAH YANG TEPAT”

RUSSELL L. ACKOFF, REDESIGNING THE FUTURE: A SYSTEMS APPROACH TO SOCIETAL PROBLEMS (1974)



BAGAIMANAKAH PROSES PERUMUSAN KEBIJAKANNYA ?

(JELAS DAN SIMPEL : *PATTON & SAWICKI, 1986*)



BAGAIMANAKAH PROSES PERUMUSAN KEBIJAKANNYA ?

(BUDI WINARNO, 2016:113-116)

TAHAP 1

-- Perumusan Masalah --

TAHAP 2

-- Agenda Kebijakan --

TAHAP 3

-- Pemilihan Alternative Kebijakan Untuk Memecahkan Masalah --

TAHAP 4

-- Tahap Penetapan Kebijakan --

PERUMUSAN MASALAH

(Policy Structuring)

Perumusan Masalah merupakan suatu proses dengan empat tahap yang saling berhubungan, yakni penghayatan masalah, pencarian masalah, pendefinisian masalah, dan spesifikasi masalah. Dari setiap tahapan-tahapan tersebut menghasilkan informasi mengenai situasi masalah, meta masalah, masalah substantif dan masalah formal.

Metode-metode perumusan masalah (William N Dunn):

1. Analisis batas
2. Analisis klasifikasional
3. Analisis hirarkis
4. Analisis sinestika
5. Analisis Brainstorming
6. Analisis perspektif berganda
7. Analisis asumsional
8. Analisis argumentasi

PERAMALAN

(Forecasting)

Peramalan (Forecasting) merupakan Prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai probabilitas kemunculan masa depan kebijakan.

Formulasi Kebijakan (Policy Formulation) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternative-alternative pemecahan masalah.

PERAMALAN MEMILIKI 3 BENTUK UTAMA:

1. Proyeksi
2. Prediksi
3. perkiraan

REKOMENDASI

(Recommendation)

Rekomnedasi (Recommendation) adalah prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan menghasilkan informasi mengenai konsekuensi yang mungkin dari serangkaian arah tindakan di masa depan dan nilai-nilai atau manfaat dari tindakan tersebut.

Rekomendasi merupakan proses rasional yang dilakukan para analis dengan memproduksi informasi dan argument-argument yang beralasan tentang solusi-solusi yang potensial dari masalah-masalah public.

PEMANTAUAN

(Monitoring)

Pemantauan (Monitoring) merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memproduksi informasi mengenai sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang lalu.

Pemantauan merupakan prosedur analisis kebijakan guna menghasilkan informasi tentang penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik. Pemantauan memungkinkan analisis untuk menjelaskan hubungan antara operasi program kebijakan dan hasil hasilnya.

Pemantauan memiliki 4 fungsi:

1. Kepatuhan (compliance)
2. Pemeriksaan (auditing)
3. Akuntansi
4. Eksplanasi

PENILAIAN (EVALUASI)

EVALUASI (EVALUATION): Prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat dari serangkaian aksi di masa lalu dan atau di masa depan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (POLICY IMPLEMENTATION): Pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

KINERJA KEBIJAKAN (POLICY PERFORMANCE): Derajat hasil kebijakan tertentu memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai.

HASIL KEBIJAKAN (POLICY OUTCOME): Konsekuensi yang teramati (terpantau) dari suatu aksi kebijakan.

Penggunaan model dalam perumusan kebijakan

Dye: Konsep & Kegunaan Model

- *Mempermudah dalam melakukan analisis kaitan antara politik dan kebijakan publik.*
- *Identifikasi aspek-aspek dalam menggali masalah-masalah kebijakan.*
- *Membantu dalam menfokuskan pendalaman dalam politik kebijakan.*
- *Memberikan arah dalam mengidentifikasi faktor yang penting dalam perumusan kebijakan.*
- *Memberikan solusi serta melakukan prediksi dampak kebijakan.*

Ada 4 pertanyaan pokok dalam mendalami model-model perumusan kebijakan

- 1) Siapa aktor yang harus berpartisipasi dalam perumusan kebijakan?**
- 2) Bagaimanakah proses dalam perumusan kebijakannya?**
- 3) Asumsi-asumsi teoritis apa yang mendasari sebuah model?**
- 4) Apa implikasi yang muncul dari penerapan suatu model?**

MODEL PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

1. MODEL SISTEM (PAINE & NAUMES): Model deskriptif karena lebih berusaha menggambarkan kenyataan yang terjadi dalam pembentukan kebijakan.
2. MODEL RASIONAL KOMPREHENSIF: Model pembentukan kebijakan yang paling terkenal dan juga yang paling luas diterima dikalangan para pengkaji kebijakan publik.
3. MODEL KEPUASAN (Simon & March): model ini menggunakan pendekatan pembentuk kebijakan berdasarkan dimensi perilaku. Para pembuat keputusan akan memilih alternative yg memuaskan tujuan-tujuan dari situasi dari pada mencari alternative yang memberikan solusi yang optimal terhadap situasi.
4. MODEL PENAMBAHAN (INCREMENTAL MODEL): Model ini mencoba untuk menyesuaikan dengan realitas kehidupan praktif dengan mendasarkan pada Pluralisme dan Demokrasi, maupun keterbatasan-keterbatasan kemampuan manusia.
5. MODEL PENGAMATAN CAMPURAN (MIXEDSCANNING) (AMITAI ETZIONI): Model ini menggunakan metode rasional komprehensif dan model incremental. Model ini merupakan suatu model terhadap pemuat keputusan yang memperhitungkan keputusan-keputusan pokok dan incremental, menetapkan proses-proses pembuatan kebijakan pokok dan urusan tinggi yang menunjukkan petunjuk-petunjuk dasar, proses-proses yang menyiapkan keputusan-keputusan pokok dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai.
6. MODEL KUALITATIF OPTIMAL (YEHEZKEL DROR): model ini diterapkan guna menganalisa karakter-karakter utama pembentukan kebijakan public dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan pokok dari kebijakan normative yang ada.

1. Model Institutional (Thomas R Dye, 1995)

Perumusan Kebijakan publik adalah output lembaga pemerintah

- **Siapa:** Eksekutif, Legislatif dan yudikatif
- **Bagaimana:** perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan mrp kewenangan pemerintah.
- **Implikasi :** Partisipasi warga dlm proses perumusan sangat minimal
- **Asumsi :** Hasil kebijakan ditentukan oleh struktur

2. Model Proses (Charles O. Jones, 1975)

Perumusan kebijakan publik sebagai aktifitas politik

- **Siapa:** pemilih, kelompok kepentingan, anggota dewan, pers, birokrat.
- **Bagaimana:** identifikasi mslh, agenda setting, formulasi kebijakan, legitimasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.
- **Implikasi/asumsi:** Siapa yang berpartisipasi tidak jelas dan sangat ditentukan proses perumusannya.

3. Teori Kelompok

Perumusan KP merupakan hubungan antar kelompok kepentingan

- **Siapa:** kelompok kepentingan yang terkait dengan birokrasi (pemerintah)
- **Bagaimana:** usaha kelompok kepentingan dalam menjalin hubungan dengan eksekutif/legislatif bagi terciptanya *rules of the game*
- **Implikasi/asumsi:** kelompok kepentingan selalu berusaha melakukan publikasi bagi kepentingan kelompok, semua kelompok kepentingan mempunyai kesempatan yang sama.

4. Teori Elit

Perumusan KP merupakan Keinginan/kepentingan Elit Politik/kekuasaan

- **Siapa:** elit yang mempunyai kekuasaan, kemampuan memunculkan isu
- **Bagaimana:** Pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan oleh elit, birokrasi hanya berfungsi menjalankan kebijakan
- **Implikasi/asumsi:** Publik sangat apatis dan bergantung pada norma para elit; sangat bersifat simbolis dan cenderung mendukung status quo

5. Model Rasional

Perumusan KP sebagai pencapaian tujuan maksimal

- **Siapa:** Pengambil keputusan (nilai sosial, politik dan budaya sering dikorbankan) yang mementingkan adanya pertumbuhan (capital/financial)
- **Bagaimana:** memilih alternatif kebijakan yang efisien guna mencapai hasil yang maksimal.
- **Implikasi/asumsi :** Keinginan publik semuanya dapat diketahui dan diukur.

6. Model Inkrementalis

Perumusan KP sebagai refleksi masa lalu

- **Siapa:** pengambil keputusan, anggota dewan dan lainnya yang terkait pada sebuah program.
- **Bagaimana:** melanjutkan apa yang telah dilakukan dan melakukan beberapa modifikasi kebijakan.
- **Implikasi/asumsi:** setuju dengan kebijakan yang ada, sulit menerima konsekuensi dan menghindari perubahan yang radikal.

7. Game Theory Model

Perumusan KP sebagai pilihan rasional pada situasi kompetitif

- **Siapa:** Pengambil keputusan / aktor yang mempunyai pilihan dan tergantung proses yang disepakati
- **How:** Setiap pengambil keputusan mempunyai strategi serta program yang berbeda.
- **Implications/assumptions:** kelompok pengambil keputusan yang selalu menang akan mempunyai hasil yang lebih baik.

8. Model Pilihan Publik (public choice)

Perumusan KP sebagai keputusan bersama dari beberapa kepentingan individu

- **Siapa** pilihan individu yang rasional yang mengokomodasi kepentingan politik dan ekonomi.
- **Bagaimana:** semua individu berpartisipasi dalam politik bagi pencapaian kepentingan ; pemerintah harus merespon kegagalan pasar.
- **Implikasi/asumsi** : individu sangat cerdas dan memahami betul apa kepentingan utama mereka.

9. Systems Theory Model

Perumusan KP sebagai hasil dari sebuah sistem

- **Siapa:** individu, kelompok atau negara dan sangat tergantung persoalan kebijakan yang muncul
- **Bagaimana:** faktor lingkungan (sistem) akan sangat menentukan hasil kebijakan.
- **Implikasi/assumsi:** stabilitas sistem menjadi tujuan utama dan biasanya kebijakan ini akan sangat mendukung status quo.

10. Kingdon-Garbage Can Model

- **Siapa:** aktor diluar maupun didalam pemerintah
- **Bagaimana:** pilihan kebijakan maupun hasil kebijakan dalam berada dalam satu keranjang dan pilihan kebijakan sangat tergantung proses yang terjadi.
- **Implikasi/asumsi:** masing-masing aktor dalam sebagai penghambat maupun pendorong pelaksanaan kebijakan.

On Duty of the Day

Membuat kelompok/individu
Untuk mengevaluasi kebijakan dengan
merumuskan kembali kebijakan yang telah
diimplementasikan, sehingga menjadi suatu
kebijakan baru yang lebih efektif.